

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PNPM MANDIRI KECAMATAN BLORA KABUPATEN BLORA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Anton Sumbogo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: sumbogo31@gmail.com

ABSTRACT

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) is a program that was launched to enable people to escape from poverty. In performing the duties required to make the work unit's financial statements in accordance with Government Accounting Standards. Government Accounting Standards are set out in Accounting Principles in preparing and presenting financial statements of the Government. This study aims to determine the format that has been reported so far that contains the disclosure and presentation of the financial found are reported. The method used is descriptive comparative analysis. Data obtained through field research is to conduct interviews at the Economic Facilitator and collecting records and documents with the object being studied relating to Financial Statements PNPM Mandiri. The population used in this study is the facilitator District of Blora area. Sampling in research using purposive sampling method is based on the population of the largest and most productive age. The results showed that faskel in running the PNPM Mandiri has records of all activities undertaken but still there is a difference between a report presented by the Government Accounting Standards, due to factors such as bureaucracy, human resources, communication and attitude.

Keywords: Akuntansi, Laporan Keuangan, Sektor Publik, PNPM Mandiri

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang sudah sejak lama ada disekitar kita dan sampai saat ini belum bisa ditemukan pemecahan solusinya. Walaupun belum bisa ditemukan solusi atas masalah ini bukan berarti pemerintah benar-benar tutup mata atas masalah kemiskinan.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi di mana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu yang lainnya dalam masyarakat (Hall dan Midgley dalam Waskitho, 2009).

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. (Usman dalam M. Sabeth Abilawa, 2006: 136).

Indikator utama kemiskinan menurut Bappenas (2006) adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, terbatasnya akses terhadap air bersih, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, lemahnya jaminan rasa aman, lemahnya partisipasi, dan besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga. Keterbatasan kecukupan dan mutu pangan dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya

status gizi bayi, anak balita, dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengonsumsi 1.571 Kkal per hari. Keterbatasan akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi, jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal.

Pemerintah melalui salah satu programnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) mencoba untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan didalam masyarakat melalui program-programnya. Aspek terkecil yang disentuh oleh PNPM adalah mengenai kelemahan dan keruntuhan ekonomi kerakyatan saat ini. PNPM hendak menghidupkan kembali tumbuhnya ekonomi kerakyatan ditengah besarnya arus gelombang ekonomi kapitalis dan monopoli kaum pemilik modal yang menguasai sentral-sentral strategis perkonomian negara ini. Untuk menjalankan program tersebut diperlukan suatu badan yang menjalankan program tersebut yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Badan Keswadayaan Masyarakat adalah suatu lembaga warga masyarakat yang berkedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu organisasi warga ditingkat desa yaitu Kelompok Swadayaan Masyarakat (KSM) yang bertanggung jawab atas keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses keputusan terutama dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan pada umumnya. Dalam menjalankan tugas dan kegiatan operasional, dibentuklah unit-unit pengelola meliputi:

1. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

UPK bertugas dan bertanggung jawab mengelola keuangan yang bersumber dari Bantuan Langsung masyarakat (BLM) maupun sumber-sumber pendanaan yang lain dalam bentuk pinjaman bergulir yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

UPL adalah unit yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan.

3. Unit Pengelola Sosial (UPS)

UPS adalah unit yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan yang terkait dengan masalah sosial dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan juga difungsikan sebagai pusat informasi sosial serta pembelajaran untuk pelaksanaan kontrol sosial.

BKM dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi kemiskinan dan menjalankan program-program pemerintah dalam hal ini BKM akan langsung berhubungan dengan dana yang akan digunakan. Dalam mempertanggungjawabkan dana diperoleh dan yang digunakan maka dibuatlah laporan keuangan. Laporan keuangan disini berfungsi untuk menunjukkan penggunaan dana oleh BKM mulai dari dana yang diperoleh sampai dengan dana yang digunakan sesuai dengan salah satu sifat akuntansi sektor publik yaitu transparan yang kemudian dilaporkan kepada Faskel yang merupakan tangan panjang dari satker PNPM Mandiri, laporan keuangan sendiri dilaporkan kepada faskel keuangan yang diharuskan membuat laporan keuangan konsolidasi untuk dilaporkan ke provinsi. "Pengelolaan keuangan program dilakukan oleh Satker PNPM Mandiri mengikuti sistem dan prosedur akuntansi pemerintah (Pedoman Umum PNPM-Mandiri, 2007: 57)".

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas sektor publik menimbulkan implikasi para manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan sektor publik setidaknya harus mengandung:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan dari penelitian ini membandingkan laporan yang telah dibuat Fasilitator dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standart akuntansi pemerintahan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh faskel di salah satu daerah pendamping Kecamatan

Bloro Kabupaten Blora dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam petunjuk Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan menganalisis data laporan keuangan Faskel yang hasil penelitian dinyatakan dalam perbandingan deskriptif bukan berupa perhitungan model angka statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara kepada pengurus tentang kegiatan PNPM dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Faskel Data sekunder dalam bentuk ringkasan menganalisis data laporan keuangan yang telah dibuat oleh Faskel yang kemudian akan dibandingkan dengan SAP .

Populasi dalam penelitian ini adalah tiga daerah dampingan Faskel di Kecamatan Blora. Dibandingkan dengan kecamatan yang lain Kecamatan Blora merupakan kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak. Ruang lingkup penelitian kemudian dibatasi pada salah satu daerah pendamping yang telah dipilih dari salah satu daerah pendamping yang terdiri dari 9-10 kelurahan/desa yang dipimpin oleh satu tim faskel (fasilitator kelurahan).

Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penulis mengambil salah satu objek daerah pendamping dari tiga daerah pendamping. Penulis memilih objek Faskel di Kecamatan Blora dikarenakan jumlah desa/kelurahan di Kecamatan Blora merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbesar yaitu dengan jumlah 12 kelurahan dan 16 desa berdasarkan rumah tangga terbesar dan penduduk usia produktif terbanyak. Dengan asumsi jumlah penduduk produktif juga menggambarkan jumlah kegiatan yang dijalankan oleh BKM dalam pemberian kredit usaha rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga sebagai dasar BKM dalam menjalankan PNPM mandiri untuk menjalankan kegiatan prasarana fisik

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, tujuan dalam melakukan wawancara adalah untuk menggali data tentang implementasi pembuatan laporan keuangan BKM dalam menjalankan PNPM Mandiri. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan yang telah diperoleh.

Teknik analisis data yang digunakan berupa

- a. Pengumpulan laporan keuangan dan wawancara yang dilakukan penulis dari salah satu fasilitator dalam daerah pengawasan.
- b. Kemudian dibandingkan dengan SAP untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasi yang dilakukan oleh Faskel Keuangan.
- c. Langkah selanjutnya penulis akan melakukan koordinasi dan evaluasi laporan keuangan kepada daerah pengawasan untuk dijadikan acuan pembuatan laporan keuangan konsolidasi faskel keuangan pada periode berikutnya, dengan harapan laporan keuangan yang disajikan akan memberikan nilai manfaat kepada Faskel didalam menjalankan tugasnya dan sebagai evaluasi atas laporan keuangan konsolidasi yang telah dilakukan oleh Faskel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Untuk menggambarkan kinerja suatu instansi, dengan melihat hal ini penyajian akan berhubungan dengan aspek sumberdaya, komunikasi, sikap, dan struktur birokrasi. Hasil wawancara kepada Fasilitator Ekonomi, dengan hasil sebagai berikut:

Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan PNPM Mandiri pada di Kecamatan Blora selama ini sudah berjalan dengan lancar dengan mengikuti tata cara program sebelumnya yaitu PNPM P2KP.

PNPM P2KP selama ini mengikuti tata cara program yang lama maka tidak ditemui banyak kendala baik didalam penyampaian informasi atau dalam pengawasan kegiatan.

Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya baik suatu kegiatan tentulah tidak akan dapat berjalan. Sumber daya menjadi sangat penting terutama berhubungan dengan kegiatan yang memerlukan tanggung jawab seperti Program PNPM Mandiri karena berhubungan dengan penggunaan anggaran sektor publik dengan tujuan pengurangan kemiskinan di masyarakat. Sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia dilakukan dengan cermat melalui seleksi-seleksi tertentu, untuk Faskel sendiri dilakukan ditingkat Provinsi, BKM dilakukan tingkat kelurahan dan untuk PJOK adalah pegawai negeri yang menjabat.

Komunikasi

Komunikasi merupakan cara menyampaikan informasi kepada lawan bicara baik secara individu maupun kelompok dengan cara lisan maupun tulisan. Program PNPM Mandiri berbeda dengan program kebijakan yang lain, PNPM mandiri adalah program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat itu sendiri maka diperlukan warga untuk berperan aktif dalam penjalanan program yang dilakukan. PNPM Mandiri menggunakan dasar *bottom up planning*, PNPM Mandiri dipandang dapat memberdayakan masyarakat tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu. Pelaksanaan kegiatan selama ini masyarakat diwakili oleh Kelompok Swadaya Masyarakat yang kemudian dilaporkan ke BKM. Penyampaian informasi haruslah didasari pada panduan yang sesuai yang telah ditetapkan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Kenyataannya semua informasi tidak dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan panduan atau informasi yang diberikan

Sikap

Selama ini program sudah dapat berjalan dengan baik hanya saja ditemukan beberapa hal yang masih belum bisa dipatuhi seperti ketaatan pelaporan laporan kegiatan BKM. Selama ini program dijalankan berdasarkan informasi yang diberikan pemerintah Fasilitator berusaha menyampaikan dan menjalankan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Tabel: Perbandingan Laporan Keuangan

Perbandingan	Laporan Keuangan Fasilitator	Standar Akuntansi Pemerintahan
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan yang disajikan dalam laporan konsolidasi yaitu laporan kegiatan, laporan, Neraca, L/R, dan laporan Konsolidasi 2. Laporan yang disajikan tidak membandingkan dengan laporan tahun lalu, 3. Laporan yang disajikan masih berupa laporan bulanan 4. Laporan konsolidasi yang disajikan masih memisahkan laporan keuangan per BKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan yang disajikan dalam laporan konsolidasi yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan keuangan 2. Laporan keuangan yang disajikan membandingkan laporan keuangan tahun lalu, dengan tujuan mengetahui perkembangan dan penggunaan anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. 3. Laporan keuangan disajikan dalam tahunan 4. Laporan konsolidasi menyajikan BKM dalam satu kesatuan dan memisahkan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan selama ini tidak menyajikan jumlah kegiatan yang telah dilakukan seperti kegiatan sosial dan lingkungan, hanya mencantumkan kegiatan ekonomi. 2. Pembuatan infrastruktur seperti pembuatan jalan tidak dimasukkan ke dalam aset 3. Kegiatan sosial dan ekonomi tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebagai aset 4. Belum adanya pengungkapan tentang saldo anggaran lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan haruslah menyajikan seluruh kegiatan yang dilakukan, terkait penggunaan anggaran dalam satu tahun anggaran. 2. Kegiatan infrastruktur seperti pembuatan jalan, irigasi dan jaringan dimasukkan ke dalam aset. 3. Kemitraan untuk menjalin jaringan dimasukkan ke dalam aset 4. Laporan saldo anggaran lebih diperlukan untuk mencatat kekurangan atau kelebihan anggaran tahun sebelumnya.

Sumber: Data Diolah, 2015

KESIMPULAN

Pelaporan dalam menjalankan program PNPM-Mandiri selama ini telah dilakukan dalam periode bulanan oleh BKM sebagai upaya mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilakukan yang kemudian disampaikan bulanan kepada Faskel dan dalam RWT (Rembuk Warga Tahunan) kepada masyarakat. Faskel selaku pengawas program BKM sudah melakukan tugasnya dengan mengecek dan merekap laporan yang telah dilaporkan oleh BKM yang kemudian disampaikan ke KMW (Konsultan Manajemen Wilayah) tingkat provinsi secara rutin. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dan dari laporan keuangan beserta catatan yang telah didapatkan. Pelaporan yang dilakukan sudah mencerminkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama satu periode akuntansi walaupun dalam pelaporannya belum sesuai dengan Pedoman Umum PNPM-Mandiri yang mengharuskan satker membuat laporan keuangan hal tersebut dikarenakan faktor faktor seperti birokrasi, sumber daya manusia, komunikasi dan sikap yang ada saat ini.

Seharusnya dalam menjalankan program informasi dapat diberikan dengan jelas agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi opini ganda dalam pelaksanaannya. Informasi yang diterima seharusnya juga dapat dijalankan sesuai dengan

pedoman dan sesuai dengan instruksi yang ada. Program PNPM mandiri adalah program yang memerlukan partisipasi masyarakat melalui perwakilan yang seharusnya dapat memberikan kritik dan saran yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang kurang jelas dalam penyampainnya seharusnya dapat ditanyakan kepada instansi yang terkait.

Peneliti selanjutnya dapat membandingkan laporan keuangan yang dibuat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sebagai pembanding. Peneliti selanjutnya juga dapat membandingkan program PNPM-Mandiri ini dengan program pengganti yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syam Kusufi, 2012, *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto dkk, 1996, *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Anonim, *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007*. Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Jakarta.
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Jakarta.
- _____, 2008, *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian dan Skripsi*, Edisi Keenam, Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.
- _____, 2012, *Standar Akuntansi Pemerintahan*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Salemba Empat, Jakarta.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011*. Penanganan Fakir Miskin, Jakarta
- Hans Kartika Hadi dkk, 2002, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikhsan Arfan, 2008, *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ihwan Kema, 2013, “Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* Vol.1 No.3 September 2013.
- Indra Bastian, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Kurniawan M. Manangkalangi, 2013, “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* Vol.1 No.3 September 2013.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Nuwun Priyono, 2012, “Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai dengan Pasca-Reformasi”, *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* Vol. 37 No. 115 September 2012.
- Waskitho, 2009, “Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)”, Fakultas Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- <http://www.blorakab.go.id> (diakses pada 14 November 2014)
- <http://blorakab.bps.go.id> (diakses pada 14 November 2014)